

Presiden Jokowi Kembali Ingatkan Pentingnya Vaksinasi Covid-19

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengimbau masyarakat agar segera vaksinasi Covid-19, baik dosis pertama hingga booster kedua. Sebab, penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia kembali mengalami lonjakan dalam beberapa waktu belakangan ini.

“Saat ini penyebaran Covid mulai agak meningkat, namun kita tidak perlu menyikapinya secara berlebihan. Dan untuk itu saya mengingatkan kembali pentingnya vaksinasi, baik vaksinasi pertama dan kedua, maupun booster yang pertama dan kedua,” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, yang dilihat dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (19/4).

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengingatkan kepada masyarakat agar tetap waspada dan tetap mengikuti anjuran pemerintah dalam rangka menekan kasus Covid-19 dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Salah satunya, menggunakan masker jika sedang merasa sakit.

“Saya meminta bagi mereka yang merasa flu atau demam agar menggunakan masker, demikian juga dengan yang memiliki komorbid gunakanlah masker, dan jika bertemu dengan lansia juga sebaiknya menggunakan masker,” imbaunya.

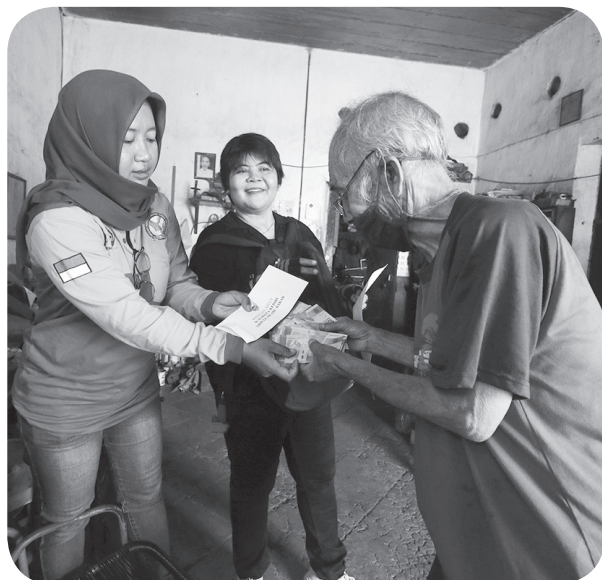
Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada masyarakat agar tetap patuh menjaga kebersihan dengan mencuci tangan sesuai berkegiatan.

“Terakhir jangan lupa untuk mencuci tangan setelah kita berkegiatan,” ucapnya.

Diketahui, kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia bertambah 725 pada, Senin 17 April 2023, kasus tersebut tersebar di sejumlah provinsi.

DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus positif Covid-19 tertinggi dengan 294 kasus. Posisi berikutnya adalah Jawa Barat dengan 159. ● mei

FOTO: ANT



BANTUAN ASISTENSI LANJUT USIA TERLANTAR
Petugas dari Tim Reaksi Cepat Dinas Sosial menyalurkan bantuan Asistensi Lanjut Usia Terlantar (Aslut) kepada warga di Kelurahan Pakelan, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (19/4). Pemerintah daerah setempat menyalurkan bantuan Aslut kepada 364 lansia terlantar senilai Rp800 ribu per orang periode Januari hingga April yang langsung diantar ke rumah warga penerima manfaat.

KPU Klaim Sudah Hapus Data TNI/Polri Terdaftar Pemilih 2024

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengklaim sudah menghapus data anggota TNI/Polri yang sempat masuk dalam daftar pemilih sebelum ditetapkan jadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), Selasa (18/4).

Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos mengaku bahwa pembersihan data ini mereka lakukan bukan berdasarkan temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

“Sudah (dihapus). Bukan karena temuan mereka (Bawaslu), tetapi karena temuan dalam proses cokolit (pencocokan dan penelitian data pemilih) teman-teman KPU,” kata Betty kepada wartawan, Rabu (19/4).

Sebelumnya, Bawaslu memang sempat menyampaikan bahwa mereka menemukan 11.457 anggota TNI dan 9.198 anggota Polri yang sempat masuk dalam data pemilih di beberapa provinsi. Betty mengklaim, pihaknya tidak menggunakan data Bawaslu se-

bagai pijakan karena data tersebut kurang lengkap. “Data dari teman-teman Bawaslu kami tidak dapatkan data by name by address,” ujarnya.

Betty menambahkan, pihaknya masih terus mendapatkan data berkala dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). KPU juga disebut telah menjalin komunikasi dengan TNI dan Polri terkait data anggota mereka.

“Bagi mereka yang akan aktif menjadi pemilih karena pensiun per 14 Februari 2024 itu kami juga tunggu *update* data-nya (dari TNI dan Polri),” ujar eks Ketua KPU DKI Jakarta.

Dalam rapat pleno kemarin ini, KPU menetapkan seluruh DPS di 38 provinsi di Indonesia, ditambah jumlah pemilih luar negeri. Total DPS di seluruh provinsi ditambah pemilih luar negeri berjumlah 205.853.518 pemilih untuk Pemilu 2024 nanti. DPS pemilih laki-laki berjumlah 102.847.040 pemilih, kemudian DPS perempuan mencapai 103.006.478 pemilih. ● mei

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan kepada seluruh pihak yang berkepentingan termasuk pada kreditur PT Kemilau Mulia Sakti (“Perseroan”) bahwa terdapat rencana akuisisi mayoritas saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

Para kreditur Perseroan dapat, selambat-lambatnya 14 hari setelah tanggal pengumuman ini, mengajukan keberatan tertulis sehubungan dengan akuisisi mayoritas saham di Perseroan ini disertai alasan dan dasar dari keberatan tersebut ke alamat dibawah ini:

PT Kemilau Mulia Sakti
Gedung Sarana Penjaminan Lt. 8
Ruang 809 Jl. Angkasa Blok B-9
Kav. 6, Kemayoran, Jakarta Pusat
DKI Jakarta Raya 10610

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 20 April 2023

Hormat Kami

PT Kemilau Mulia Sakti

Direksi

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



MUDIK BUS GRATIS PDIP

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (ketiga kanan) bersama Ketua DPP PDIP Wiryanti Sukamdani (kanan) dan Rokhmin Dahuri (kedua kanan) melepas keberangkatan bus mudik gratis di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/4). PDI Perjuangan memberangkatkan 178 bus mudik gratis untuk ribuan pemudik dengan berbagai tujuan di Pulau Jawa dan Sumatera.

PKS Minta Pemerintah Tak Setengah Hati Menyelesaikan Masalah KKB di Papua

TNI didesak agar tidak setengah-setengah bertindak meski sudah menaikkan status operasi menjadi siaga tempur di Nduga, Papua.

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukanta meminta TNI jangan setengah hati dalam menyelesaikan masalah kekerasan yang kerap dilakukan teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Seperti diketahui, KKB kembali berubah menyerang prajurit TNI yang sedang mencari pilot Susi Air, Philip Marks Methrens. Akibat kejadian itu, satu prajurit gugur, sementara lima lainnya hingga kini belum ditemukan.

Sukanta mendesak TNI agar tidak setengah-setengah bertindak meski sudah menaikkan status operasi menjadi siaga tempur.

“Adanya rangkaian serangan oleh KKB yang menyebabkan cukup banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban, menunjukkan pemerintah selama ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh,” ujar Sukanta saat dikonfirmasi, Rabu (19/4).

“Kalau mau ditingkat-

kan jadi siaga tempur, tapi pendekatannya penyelesaiannya masih setengah hati, yang akan jadi korban para prajurit TNI dan warga sipil,” katanya.

Sukanta menjelaskan, seharusnya pemerintah bisa menentukan pendekatan apa yang paling tuntas untuk memutuskan rangkaian kekerasan yang dilakukan KKB. Sebab, pemerintah memiliki bekal informasi yang dihimpun oleh intelijen dan masukan dari tokoh masyarakat lokal.

“Siapa aktornya, bagaimana jaringannya, di mana wilayah kerjanya, saya yakin pemerintah sudah mengetahuinya. Kalau ini masuk dalam kategori separatisme, mestinya jelas siapa yang punya tanggung jawab mengatasi hal ini,” jelas Sukanta.

Sukanta merasa kasihan dengan prajurit TNI dan anggota Polri yang terus berguguran karena ulah KKB. Terlebih, TNI dibelenggu dengan tidak adanya peraturan turunan dari UU TNI terkait operasi militer selain perang (OMSP).

Lebih jauh, Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyoroti anggaran untuk TNI melakukan operasi di Papua sangat terbatas dengan peralatan seadanya.

“Apakah dengan ditingkatkan status operasi menjadi siaga tempur akan ada tambahan anggaran, ada tambahan personel, penambahan peralatan tempur, sudah ada pengkondisian wilayah? Kalau tidak ada perbedaan, artinya ini masih jadi kebijakan yang

setengah hati,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga menjadi siaga tempur. Hal itu menyusul serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap 36 personel TNI di Distrik Mugi, Nduga, Papua Pegunungan yang mengakibatkan Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu (15/4).

“Kita tetap melakukan operasi penegakan hukum dengan soft approach dari awal saya sudah dampakan itu, tapi tentunya dengan kondisi seperti ini, di daerah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur,” kata Panglima di Mimika, Papua Tengah melalui rekaman suara yang dibagikan, Selasa (18/4). ● han

Muhammadiyah Dilarang Gunakan Lapangan untuk Sholat Idul Fitri, Ini Kata Mahfud MD

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti soal pelanggaran penggunaan lapangan untuk Sholat Idul Fitri.

Mahfud menegaskan, bahwa polemik itu telah usai. Hal itu ia yakini setelah dirinya melakukan koordinasi dengan pemkot terkait.

“Saya sudah koordinasi ke sana (Pekalongan) dengan Pemda dan sudah ditempatkan fasilitas tertentu di ruas jalan,” kata Mahfud saat ditemui di command center KM 29 jalan tol Jakarta-Cikampek, dikutip, Rabu (19/4).

Muhammadiyah tak diizinkan untuk menyelenggarakan ibadah sholat Idul Fitri di lapangan terbuka di sejumlah daerah. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta negara hadir secara adil dan ihsan dalam memandang dan memberikan fasilitas jika terjadi perbedaan penetapan waktu Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di Indonesia.

“Lebaran Idul Fitri boleh berbeda, tetapi kita bisa bersama merayakan dan melaksanakannya,” kata Haedar, mengutip situs Muhammadiyah.or.id, Senin (17/4).

“Kalau besok ada perbedaan itu adalah hal yang lumrah karena ini soal ijtihad, sampai nanti kita bersepakat ada kalender Islam global,” ujarnya.

Hari Raya Idul Fitri 1444H atau lebaran 2023 akan dirayakan di waktu yang berbeda antara Pemerintah, NU hingga Muhammadiyah.

Pemerintah memprediksi penetapan 1 Syawal 1444 H pada Sabtu (22/4). Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid Sa’adi menyatakan, hal ini karena pada 21 April 2023 posisi hilal masih di bawah ufuk. Sebab itu, pemerintah baru akan melakukan sidang isbat pada 20 April 2023 mendatang.

Data bulan pada tanggal 29 Ramadhan 1444 H atau 20 April 2023 berdasarkan markas Jakarta menunjukkan ketinggian hilal berada pada 1 derajat 55 menit 43 detik dan elongasi 3 derajat 18 menit

23 detik. Sedangkan, waktu hilal di atas ufuk berlangsung selama 9 menit 29 detik. Sementara ijtimak terjadi pada Kamis Legi, 20 April 2023 pada pukul 11.16.38 WIB.

Sementara itu, letak matahari terbenam pada 11 derajat 30 menit 16 detik utara titik barat, sedangkan letak hilal pada 13 derajat 02 menit 49 detik utara titik barat. Kedudukan hilal sendiri berada pada 1 derajat 32 menit 32 detik utara matahari dalam keadaan miring ke utara.

Data di atas menunjukkan bahwa hilal sudah berada di atas ufuk, tetapi ketinggian hilal masih berada di bawah standar minimal imkan rukyah (visibilitas) atau kemungkinan hilal dapat terlihat, yaitu 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Hal itu berarti bahwa kemungkinan hilal dapat dirukyah sangatlah kecil. Jika hilal tidak dapat terlihat atau teramat oleh para rukyah, tentu bulan Ramadhan 1444 H harus digenapkan menjadi 30 hari.

Ketentuan itu disebut istikmal atau ikmal, yaitu jumlah hari dalam satu bulan disempurnakan menjadi 30 hari. Dengan begitu, kemungkinan terbesar hari raya Idul Fitri, 1 Syawal 1444 H akan jatuh bertepatan dengan hari Sabtu Pon, 22 April 2023.

Berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tarjih, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1444H.

Muhammadiyah telah mengumumkan tentang penetapan hasil hisab ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1444H. Sekretaris PP Muhammadiyah, Muhammad Sayuti membacakan Maklumat PP Muhammadiyah yang menetapkan awal 1 Ramadhan 1444H jatuh pada hari Kamis, 23 Maret 2023.

“Umur bulan Syakban

1444 H adalah 30 hari dan tanggal 1 Ramadhan 1444 H jatuh pada hari Kamis Pon 23 Maret 2023 M. Jadi mulai tarawih, Rabu malam,” ungkap Sayuti dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Senin 6 Februari 2023.

Terkait Syawal 1444H yang merupakan Idul Fitri, dia menyampaikan pada hari Kamis Legi, 29 Ramadhan 1444 H bertepatan dengan 20 April 2023 M, ijtimak jelang Syawal 1444 H terjadi pada pukul 11:15:06 WIB.

Dia menjelaskan, tinggi Bulan pada saat Matahari terbenam di Yogyakarta +01° 47’ 58” dengan demokrasi hilal sudah wujud. Di seluruh wilayah Indonesia pada saat Matahari terbenam itu bulan sudah berada di atas ufuk. “Tanggal 1 Syawal 1444 H jatuh pada hari Jumat Pahing, 21 April 2023 M,” katanya. ● han

Prima Gugat Lagi KPU karena Tidak Lolos Verifikasi Faktual

JAKARTA (IM) - Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) kembali menggugat Pemilihan Umum (KPU) RI ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI karena dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2024.

“Benar (mengajukan sengketa), diajukan kemarin, Selasa (18/4). Objek sengketa berita acara KPU,” kata Sekretaris Jenderal Prima, Domingus Oktavianus kepada wartawan, Rabu (19/4).

Sebagai informasi, Prima sudah dua kali gagal jadi peserta pemilu karena tak lolos verifikasi administrasi. Prima sempat menggugat perdata KPU RI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dan semua gugatannya dikabulkan.

Kemudian, Prima menggunakan putusan ini sebagai dasar waktu peristiwa pelanggaran administrasi KPU untuk menggugat ke Bawaslu. Bawaslu kemudian juga

memenangkan Prima dan memberi kesempatan mereka diverifikasi lagi.

Hasilnya, Prima dinyatakan lolos verifikasi administrasi lolos. Tetapi, verifikasi faktual mereka mengalami kendala. Sesuai aturan, Prima dipersilakan mengirim dokumen perbaikan untuk diteliti. Jika hasil verifikasi atas dokumen ini memenuhi syarat, maka Prima berhak ikut verifikasi faktual perbaikan.

Namun, karena Prima mengalami hal sebaliknya, maka verifikasi faktual perbaikan tidak bisa dilakukan untuk Prima. Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari kemudian menekan Surat Keputusan Nomor 360/PL.01.1-SD/05/2023 pada Minggu (16/4), mengutip Berita Acara Nomor 645/PL.01.1-BA/05/2023 tentang hasil potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota partai politik hasil perbaikan yang dirilis pada hari yang sama. ● han

FOTO: ANT



PELUNCURAN KAPAL KORVET BUNG KARNO-369

Sejumlah pekerja meluncurkan Kapal Korvet Bung Karno-369 buatan dalam negeri di galangan PT Karimun Anugrah Sejati, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (19/4). Kapal Korvet Bung Karno-369 dilengkapi dengan meriam kaliber 40 mm, dua unit senjata kaliber 20 mm dan mampu mengangkut 55 personel dengan kecepatan maksimum 24 knot yang dirancang sebagai kapal VVIP Kepresidenan menggantikan KRI Barakuda-833 yang sudah beroperasi selama 27 tahun.